

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BKD
TAHUN 2013-2018**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

**Jl. Dr. Suparno No. 32 Telpon (0281) 636 079
PURWOKERTO**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Mekanisme penyusunan Renstra SKPD harus selaras dengan mekanisme penyusunan RPJM Daerah. penyusunan Renstra SKPD dilaksanakan setelah Rancangan Awal RPJM Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2013-2018. Oleh karena itu mekanisme penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas harus selaras dengan mekanisme penyusunan RPJM Daerah.

Setelah penetapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Banyumas periode tahun 2013 – 2018 maka sesuai Surat Edaran Nomor 050/6491/2013 tanggal 10 November 2013 maka kepala SKPD menyusun Renstra Tahun 2013 – 2018 yang merupakan tanggung jawab Kepala SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Penetapan indikator sasaran dan indikator program / kegiatan yang ada dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 adalah indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai selama ini dan diselaraskan dengan Program Prioritas Daerah.

B. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Pasal 7 ayat (1) Renstra SKPD memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);

C. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013-2018.

Maksud disusunnya Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas pada Tahun 2013-2018 dalam sebuah dokumen perencanaan. Dalam dokumen Renstra ini juga dimuat kebijakan, strategi, dan program pembangunan di bidang kepegawaian untuk membantu organisasi dalam mengatasi lingkungannya yang terus berubah untuk merumuskan serta memecahkan masalah yang dihadapi.

- b. Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013-2018.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 adalah untuk memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di bidang kepegawaian pada tahun anggaran 2013 - 2018 dan juga sebagai pedoman kebijakan kepegawaian pada kurun waktu tersebut.

D. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya BKD
- C. Kinerja Pelayanan BKD
 - 1. Pencapaian Kinerja BKD
 - 2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKD
- D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD.

Bab III: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD
- B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- C. Penentuan isu-isu Strategis
- D. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Bab IV: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

- A. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas
- B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD
- C. Strategi dan Kebijakan

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

- 1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD.

Bab VI: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

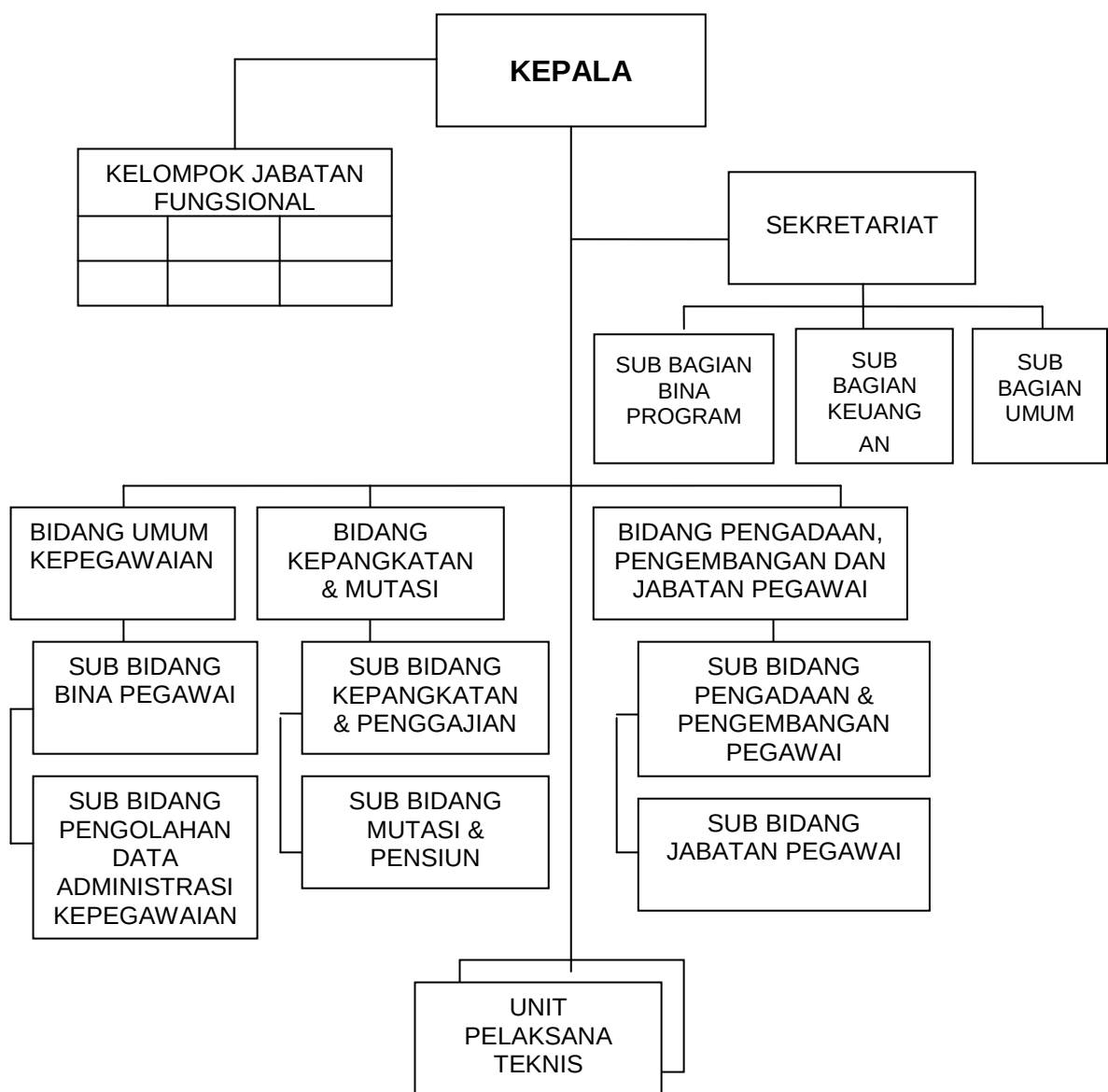
Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup kepegawaian daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup kepegawaian daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup kepegawaian daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas. , terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 3 Kepala Sub Bagian, 6 Kepala Sub Bidang dan Staf Pelaksana / Kelompok Jabatan Fungsional Umum merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang kepegawaian sehingga sangat diperlukan penyusunan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan kepegawaian di masa depan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja



B. Sumber Daya SKPD.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsi tentunya harus didukung dengan sumber daya yang dimiliki baik berupa sumber daya manusia aparatur yang ada maupun dukungan sarana dan prasarana yang dikelola oleh BKD Kabupaten Banyumas.

Adapun sumber daya aparatur yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan golongan, jenis kelamin dan jenjang pendidikan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Gol. Ruang	PNS	CPNS	Jenis Kelamin		Pendidikan					
			L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JML	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II/b	7	-	6	1	-	-	7	-	-	-
II/c	2	-	1	1	-	-	-	2	-	-
II/d	3	-	1	2	-	-	-	3	-	-
JML	12	0	8	4	0	0	7	5	0	0
III/a	6	-	5	1	-	-	3	1	2	-
III/b	13	-	8	5	-	-	5	1	7	-
III/c	7	-	3	4	-	-	-	-	6	1
III/d	9	-	5	4	-	-	-	-	7	2
JML	35	0	21	14	-	-	8	2	22	3
IV/a	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
IV/b	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
IV/c	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JML	3	0	3	0	0	0	0	0	1	2
PTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	52	0	34	18	0	2	15	7	23	5

JUMLAH ESELON :

IV.B	IV.A	III.B	III.A	II.B	II.A
-	9	3	1	1	-

Sedangkan sarana prasarana kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Banyumas berupa Tanah dan Bangunan Kantor sebagai tempat kesekretariatan serta didukung sarana peralatan dan perlengkapan kantor guna penunjang operasional sebagai mobilitas pelaksanaan administrasi perkantoran maupun kegiatan lainnya.

Sedangkan aset yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	
I	TANAH		
1.	Tanah Bangunan Kantor	1	Unit
II	GEDUNG DAN BANGUNAN		
1.	Bangunan gedung kantor permanaen (lama)	1	Unit
2.	Bangunan gedung kantor dan aula permanen (baru).	1	Unit
3.	Ruang kerja lantai 2 dan Mushola	1	Unit
III	PERALATAN DAN MESIN		
1.	Komputer/Laptop	86	buah
2.	Printer	67	buah
3.	UPS	30	buah
4.	Proyektor	3	buah

5.	Layar proyektor	2	buah
6.	Aplikasi SIMPEG	1	paket
7.	Peralatan jaringan komputer VPN IP 128	1	paket
8.	Server	2	buah
9.	Website BKD	1	paket
10.	Windows server 2003	2	buah
11.	DVD writer	2	buah
12.	Wireless	2	buah
13.	Scener	1	buah
14.	HUB (pembagi jaringan komputer)	2	buah
15.	Genset	1	buah
16.	Mebeler	28	Jenis
17.	Kendaraan roda 4	6	Buah
18.	Kendaraan roda 2	23	Buah
19.	Central telpon, Fax dan PABX.	1	Nomor/unit
20.	Brandkas	4	buah
21.	Mesin ketik	19	buah
22.	AC (penyejuk udara)	26	buah
23.	Kipas angin	8	buah
24.	Alat pemedam	8	buah
25.	Sound system	1	Set
26.	Camera digital	2	buah
27.	Handycam	1	buah
28.	Televisi	3	buah
29.	Alat penghancur kertas	1	buah
30.	Whiteboard	15	buah

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengetahui hasil pelayanan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bayumas pada maka perlu adanya review capaian kinerja SKPD (Tabel C.I), serta anggaran dan realisasi pendanaan (Tabel C.II) untuk lima tahun ke belakang dari tahun 2008-2013.

TABEL C. I. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD.

NO	INDIKATOR KINERJA	Berdasarkan			Target Renstra SKPD Tahun 2008-20013 / Th ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian (%)				
		SPM	IKK	lainnya	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
1	Terlaksananya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Banyumas (6 Kegiatan)			√															
	- Meningkatnya kemempuan petugas dalam menyelesaikan kasus kepegawaian (org)			√	200	100	0	0	115	199	0	0	0	115	100	0	0	0	100
	- Meningkatnya pemahaman PNS tentang penyusunan formasi PNSD (org)			√	56	84	0	0	50	56	81	0	0	0	100	96	0	0	0
	- Meningkatnya pemahaman pengelola kepegawaian tentang jabatan fungsional (org)			√	50	135	0	0	60	50	135	0	0	0	100	100	0	0	0
	- Meingkatnya pemahaman PNS mengenal aturan kepegawaian			√	0	50	0	0	100	0	50	0	0	0	0	100	0	0	0
	- Meningkatnya pemahaman PNS menegenai tanda kehormatan RI / Fasilitas satyalancana (org)			√	0	100	0	0	0	0	100	34	36	40	0	100	34		
	- Terlaksananya pembinaan PNS (kegiatan)			√	1	10	30	30	30	1	3	41	36	3	100	30	136	120	10
	- Pengembangan sumber daya aparatur melalui Diklat,tugas belajar/ijin belajar (org)			√	479	1200	1400	1450	1500	2468	1518	289	847	1462	515	127	20	60	97

	- Terfasilitasinya penyingkapan calon praja IPDN tingkat kabupaten (org)		√	40	40	44	49	54	30	40	31	51	93	75	100	70	104	172
2	Terisinya kekuarangan formasi pegawai secara pertahap sesuai kebutuhan.		√	2000	772	800	800	800	737	703	1522	0	1	37	91	190	0	0,1
3	Pembekalan dan penghargaan terhadap PNS yang purna tugas.		√	35	200	0	150	180	35	0	0	0	47	100	0	0	0	26
4	Terbitnya perikan SK kenaikan pangkat PNS.		√	4000	4000	4000	4000	4000	2302	2576	2173	2879	3085	58	64	54	72	77
5	Terbitnya petikan SK peninjauan masa kerja golongan PNS.		√	125	100	350	350	350	12	139	253	117	107	10	139	72	33	30
6	Terfasilitasinya Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu dan pemrosesan mutasi PNS		√	584	849	695	715	745	584	644	760	525	871	100	76	109	73	117
7	Terfasilitasinya penilaian penetapan angka kredit PNS.		√	30	200	225	225	225	15	50	92	13	13	50	25	40	6	6
8	Terbitnya SK PNS dan berita acara sumpah / janji PNS.		√	700	1451	1021	737	772	621	1450	1394	1396	571	89	100	136	189	74
9	Terlaksananya fasilitasi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah		√	14	60	80	85	90	14	60	96	195	0	100	100	120	229	0
10	Bertambahnya kepemilikan Karpeg dan Karis - Karsu		√	1281	1500	675	680	685	1096	1500	2282	609	2156	86	100	338	89	183
11	Terfasilitasinya ujian dinas PNS tingkat I dan II		√	68	71	125	125	125	68	71	39	49	71	100	100	31	39	56
12	Terlaksananya LHKPN (laporan/pejabat penyelenggara negara)		√	27	30	28	28	28	30	7	27	24	35	111	23	96	85	125
13	Terwujudnya tertib administrasi PTT (org)		√	1096	651	387	166	90	1096	649	126	126	109	100	99,6	32	76	121
14	Penyelesaian permasalahan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.																	
	- Terlaksananya Inspeksi mendadak (Sidak) PNSD. (kegiatan)		√	10	6	5	8	10	10	6	4	1	1	100	100	80	12	10

	- Penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian PNS		√	35	20	25	25	25	17	30	42	74	34	49	150	148	29	136
	- Penyelesaian SK penjatuan hukuman disiplin.		√	50	45	50	50	50	16	41	19	39	16	32	91	38	78	32
15	Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian (Meningkatnya keahlian sesuai dengan tupoksi)																	
	- Terisnya jabatan sesuai dengan formasi dan pengukuran kompetensi jabatan struktural (org)		√	950	400	440	500	510	1003	1558	376	335	557	106	390	85	67	109
	- Penataan dan pengembangan karir pegawai secara porposional (org)		√	12000	500	330	350	370	11671	515	376	847	8869	97	103	87	242	2397
16	Tersedianya data PNS yang up date dan akurat (unit kerja)		√	44	27	84	66	57	35	27	84	84	90	80	100	100	127	157
17	Tertata dan terpelihara file arsip kepegawaian di Pemkab Banyumas. (%)		√	100	100	100	100	100	90	94	90	98	100	90	94	90	98	100
18	Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. (program)		√	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100	0	0	0	100

TABEL C. II. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD.

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Anggaran dengan Realisasi					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Pelaksanaan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Banyumas (6 Kegiatan)																	
	- Meningkatkan kemampuan petugas dalam menyelesaikan kasus kepegawaian (org)	59.870.000	0	0	0	50.000.000	49.612.150	0	0	0	25.010.700	1.2	0	0	0	2	21.974.000	19.922.430

	- Meningkatkan pemahaman PNS tentang penyusunan formasi PNSD (org)	50.387.200	70.000.000	0	0	0	28.039.650	11.825.000	0	0	0	1,8	5,9	0	0	0	24.077.440	19.607.930
	- Meningkatkan pemahaman pengelola kepegawaian tentang jabatan fungsional (org)	25.940.500	50.000.000	0	0	0	19.298.050	39.102.750	0	0	0	1,3	1,3	0	0	0	15.188.100	13.859.610
	- Meningkatkan pemahaman PNS mengenal aturan kepegawaian	0	24.150.000	0	0	0	0	8.891.500	0	0	0	0	2,7	0	0	0	4.830.000	4.830.000
	- Meningkatnya pemahaman PNS mengenai tanda kehormatan RI / Fasilitas satyalancana (org)	0	20.000.000	0	0	0	0	13.801.100	0	0	0	0	1,4	0	0	0	4.000.000	4.000.000
	- Pelaksanaan pembinaan PNS (kegiatan)	32.675.000	56.986.000	0	0	75.000.000	28.973.400	32.347.000	0	0	58.98700	1,1	1,8	0	0	1,3	32.932.200	32.191.880
	- Pengembangan sumber daya aparatur melalui Diklat,tugas belajar/ijin belajar (org)	5.950.000.000	4.728.246.100	569.208.000	275.000.000	1.040.000.000	4.077.510.140	3.864.195.400	353.819.000	244.043.700	868.515.575	1,5	1,2	1,6	1,1	1,2	2.512.490.820	2.137.992.848
	- Fasilitas penyalangan calon praja IPDN tingkat kabupaten (org)	26.735.000	27.000.000	0	0	10.000.000	13.847.750	10.321.160	0	0	8.200.000	1,9	2,6	0	0	1,2	12.747.000	10.169.550
2	Pengisian kekuarangan formasi pegawai secara pertahap sesuai kebutuhan.	879.784.000	865.545.000	663.772.500	800.000.000	480.000.000	463.082.355	418.384.200	427.907.200	193.878.850	45.490.500	1,9	2,1	1,6	1,1	1,2	737.820.300	654.479.971
3	Pembekalan dan penghargaan terhadap PNS yang purna tugas.	14.937.500	0	0	0	0	12.239.570	0	0	0	0	1,2	0	0	0	0	2.987.500	2.447.971
4	Penerbitan petikan SK kenaikan pangkat PNS.	210.000.000	220.000.000	0	186.000.000	210.000.000	152.998.400	115.377.500	0	151.286.925	153.441.450	1,4	1,9	0	1,2	1,4	165.200.000	153.799.680
5	Penerbitan petikan SK peninjauan masa kerja golongan PNS.	40.000.000	9.350.000	0	0	0	4.272.250	4.875.000	0	0	0	9,4	1,9	0	0	0	9.870.000	2.724.450
6	Fasilitas kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu dan pemrosesan mutasi PNS	105.983.000	76.500.000	0	0	120.350.000	82.512.310	51237.030	0	0	85.556.000	1,3	1,5	0	0	1,4	60.566.600	55.872.462
7	Fasilitas penilaian penetapan angka kredit PNS.	35.000.000	20.450.000	0	0	20.000.000	4.614.100	7.410.100	0	0	12.955.775	7,6	2,8	0	0	1,5	15.090.000	9.012.820
8	Penerbitan SK PNS dan berita acara sumpah / janji PNS.	40.000.000	45.000.000	0	0	25.000.000	19.578.350	32.196.420	0	0	18.779.300	2	1,4	0	0	1,3	22.000.000	17.915.670

9	Fasilitasi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah	31.390.000	40.000.000	0	0	0	18.211.075	27.938.240	0	0	0	1,7	1,4	0	0	0	14.278.000	11.642.215
10	Fasilitasi kepemilikan Karpeg dan Karis - Karsu	25.000.000	16.530.000	0	0	15.000.000	14.664.650	10.399.900	0	0	10.503.500	1,7	1,6	0	0	1,4	11.306.000	9.238.930
11	Fasilitasi ujian dinas PNS tingkat I dan II	36.981.000	31.410.000	0	0	55.540.000	31.315.975	28.081.820	0	0	37.573.900	1,2	1,1	0	0	1,5	24.786.200	23.653.195
12	Pengumpulan dan pelaporan dokumen Harta Kekayaan Pejabat Negara /LHKPN. (laporan/pejabat penyelenggara negara)	15.509.000	10.600.000	0	0	0	10.953.925	4.910.000	0	0	0	1,4	2,2	0	0	0	5.221.800	4.310.785
13	Pengelolaan dan tertib administrasi PTT (org)	41.320.900	90.000.000	61.499.450	70.000.000	295.597.000	8.082.900	45.478.300	42.112.000	65.940.000	238.900.000	5,1	2	1,5	1,1	1,2	111.683.470	105.035.870
14	Penyelesaian permasalahan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian. - Penyelesaian SK penjatuhan hukuman disiplin	75.000.000	50.000.000	0	0	47.200.000	3.904.400	24.354.900	0	0	32.951.650	1,4	2,1	0	0	1,4	34.458.000	30.238.880
	- Pelaksanaan Inspeksi mendadak (Sidak) PNSD. (kegiatan)	35.500.000	22.694.000	0	0	0	24.332.750	12.186.400	0	0	0	1,5	1,9	0	0	0	11.638.800	9.405.350
15	Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian (Meningkatnya keahlian sesuai dengan tupoksi)																	
	- Pengisian jabatan sesuai dengan formasi dan pengukuran kompetensi jabatan struktural (org)	93.974.000	120.000.00 0	0	0	197.460.00 0	65.106.100	92.361890	0	0	109.593.200	2,5	1,3	0	0	1,8	82.286.800	71.134.895
	- Penataan dan pengembangan karir pegawai secara porprosional / penataan pejabat fungsional (org)	5.898.500	50.000.000	0	0	100.000.00 0	26.109.850	38.041.070	0	0	66.397.400	2,9	1,3	0	0	1,5	45.179.700	35.221.970
16	Pengelolaan dan penyediaan data PNS yang up date dan akurat (unit kerja)	49.748.500	60.200.000	0	0	185.000.00 0	38.214.475	39.014.800	0	0	150.350.225	1,3	1,5	0	0	1,2	.989.700	56.682.895

17	Penataan dan pemeliharaan file arsip kepegawaian di Pemkab Banyumas. (%)	92.800.200	53.200.000	0	0	20.000.000	83.039.100	30.253.900	0	0	12.534.000	1,1	1,8	0	0	1,6	33.200.040	31.247.820
18	Pembuatan dan pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian / SIMPEG. (program)	64.595.000	66.600.000	0	0	0	61.004.000	47.218.993	0	0	0	1,1	1,4	0	0	0	26.239.000	25.520.800

Simpulan dari hasil capaian kinerja layanan SKPD secara umum menunjukkan tingkat yang cukup baik, hanya beberapa layanan perlu dibenahi terkait dengan layanan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja layanan yang lain yaitu berupa peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang berupa :

- a. Peningkatan pemahaman pengelola kepegawaian dalam penyusunan formasi pegawai.
- b. Peningkatan pemahaman pengelola kepegawaian tentang jabatan fungsional.
- c. Peningkatan pemahaman PNS tentang aturan kepegawaian.

Dan di program pembinaan dan pengembangan aparatur, ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya tidak sesuai dengan harapan atau target yang diinginkan hal ini karena tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebagai penentu kebijakan atau pelaksanaan kegiatan di daerah antara lain:

- a. Penetapan formasi dan Pengadaan Pegawai.(Pemerintah pusat / BKN / Kementrian PAN & RB)
- b. Ujian Dinas Tingkat I dan II. (Pemerintah Provinsi / BKD Provinsi)
- c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah. (pemerintah Provinsi / BKD Prov)

D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas sebagai unit pelayanan pengaturan sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas dan pengatur manajemen sumber daya manusia. tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan, baik dari dalam organisasi BKD itu sendiri maupun dari lingkungan luar BKD. Lingkungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja SKPD. Sebagai institusi yang memiliki peran strategis tersebut tentunya akan berpengaruh pada maju mundurnya Kabupaten Banyumas, baik di masa sekarang maupun di masa akan datang, dari faktor tersebut diatas dapat dilihat dari menelaah tantangan dan peluang yang ada, **tantangan** merupakan suatu kondisi yang dapat mengakibatkan gagalnya suatu program dan/atau kegiatan yang berasal dari luar organisasi sedangkan **peluang** diartikan sebagai suatu kondisi masa depan yang dapat dijadikan alternatif pemecahan masalah dengan melihat kekuatan yang ada pada tubuh organisasi.

Tantangan dan peluang yang mempengaruhi pelayanan BKD Kabupaten Banyumas tersebut antara lain :

a. Tantangan :

- 1) Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang belum stabil dan mapan;
- 2) Masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintah (daerah) dalam mewujudkan pelayanan prima dan *good governance*;
- 3) Perubahan kebijakan dari Pemerintah (pusat) yang bisa terjadi sewaktu-waktu akibat adanya perubahan kepemimpinan nasional ataupun adanya berbagai kepentingan berbagai pihak;
- 4) Kemajuan teknologi yang pesat yang tidak dibarengi dengan meningkatnya kompetensi aparatur.
- 5) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kegiatan pembangunan.
- 6) Sistem *reward* PNS yang tidak jelas.

b. Peluang :

- 1) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dalam sistem manajemen;
- 2) Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah;
- 3) Kerjasama dengan lembaga-lembaga dan *stakeholders*;
- 4) Semakin disempurnakannya sistem anggaran berbasis kinerja;
- 5) Desentralisasi dan otonomi daerah yang semakin nyata;
- 6) Globalisasi dan pasar bebas

Dari tantangan dan peluang yang telah diidentifikasi tersebut diatas, akan dapat memberikan arah kebijakan atau menentukan tindakan-tindakan baik untuk pengembangan pelayanan maupun mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang timbul, guna memperkecil resiko negatif dari pelaksanaan pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan organisasi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas sebagai pengaturan sumber daya aparatur dan pengaturan manajemen kepegawaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya masih mengalami permasalahan atau kekurangan yang harus dibenahi sesuai dengan perkembangan waktu, hal tersebut dapat diidentifikasi permasalahan atau kelemahan yang harus dibenahi antara lain :

- a. Memperbaiki mekanisme penataan pegawai berdasarkan pada analisis kebutuhan riil pegawai;
- b. Peningkatan pelayanan kepegawaian melalui penyempurnaan mekanisme pelayanan yang baku dan pemanfaatan teknologi informasi .
- c. Peningkatan kapasitas institusi dan kemampuan SDM aparatur yang berorientasi pada pemanfaatan dukungan lembaga dan *stake holders*.
- d. Peningkatan orientasi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima;
- e. Memperbaiki manajemen kepegawaian menghadapi kemungkinan perubahan yang bisa terjadi setiap waktu.

B. Telaah Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Melihat dan menelaah dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2013 -2018 yaitu :”MEWUJUDKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS YANG BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA” serta dijabarkan atau dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas maka dapat ditelaah sebagaimana termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Banyumas 2013 – 2018 maka dijabarkan kedalam kebijakan umum dan program pembangunan sedangkan kesesuaian misi yang

dilaksanakan oleh Badan Kebegawaian Daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas dan fungsinya maka berkenaan dengan misi 1 (kesatu) **Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintah yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.** Perwujudan birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif adalah sebagai program prioritas pembangunan sebagai pelebagaan good governance, clean and strong government, sebagai upaya perwujudan perilaku birokrasi yang efektif dan efisien serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun *kebijakan umum* terkait dengan hal tersebut antara lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKD yaitu :

1. Peningkatan budaya kerja aparatur yang profesional yang bebas dari KKN.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDA aparatur.

Sedangkan BKD masuk dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Penjabaran program terkait dengan kepegawaian yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

C. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan analisis lingkungan strategis yaitu tantangan dan peluang maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi BKD Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu lima tahun kedepan, antara lain :

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- b. Dukungan dan kesiapan aparatur terhadap Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah;
- c. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM Aparatur yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem manajemen kepegawaian.
- d. Meningkatkan tanggung jawab, kerjasama, profesionalisme, motivasi dan pelayanan guna mewujudkan *good governance*.

- e. Kemampuan SDM Aparatur dalam menyikapi perubahan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat.
- f. Peningkatan kompetensi aparatur untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin pesat dalam rangka meningkatkan kinerja;

Untuk mengoptimalkan pencapaian pelayanan kinerja, selain penentuan perumusan isu strategis juga melihat analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari Renstra tahun sebelumnya.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas

Mendasari visi misi Bupati / Wakil Bupati terpilih 2013 – 2018 pada rumusan misi 1 (kesatu) yaitu Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas sesuai tugas dan fungsinya menetapkan visi misi sebagai berikut:

Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas adalah ***“Mewujudkan Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bermoral, kompetitif dan profesional”***.

Pengertian mewujudkan aparatur pemerintah Kabupaten Banyumas bermoral adalah aparatur pemerintah yang berperilaku baik, yang jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Aparatur pemerintah yang kompetitif adalah aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan dibidangnya dan memiliki jiwa bersaing secara jujur dan sportif. Sedangkan aparatur pemerintah yang profesional adalah aparatur pemerintah yang memiliki pengetahuan / wawasan yang luas, keahlian, ketrampilan dan memandang kedepan serta memiliki sikap untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai misi sebagai berikut :

1. **Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah dan dengan cermat mengelola penggunaan sumber daya manusia tersebut.**
2. **Mengakui performa dan prestasi pada semua tingkatan dan menciptakan lingkungan kerja profesional yang memberikan jalan bagi pemenuhan diri serta pengembangan karir aparatur pemerintah daerah.**
3. **Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.**

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas melaksanakan 2 program yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas yaitu Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bermoral, kompetitif dan profesional menuju terciptanya prinsip-prinsip *good governance* (*akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat*).

Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia aparatur.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai;
3. Meningkatkan Kualitas Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional;
4. terselesaikannya masalah kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan up to date;
6. Terlaksananya aplikasi program SIMPEG;

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD dapat dilihat dalam **tabel B.1.**

C. Strategi dan Kebijakan.

Strategi merupakan cara bagaimana untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam mencapai tujuan dan sasaran serta visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas, strategi yang dikembangkan antara lain :

1. Restrukturisasi organisasi yang bertujuan untuk lebih meningkatkan profesionalisme manajemen dan stabilitas organisasi;
2. Pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana secara optimal dalam rangka mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komputerisasi sistem manajemen;
3. Meningkatkan tanggung jawab, kerjasama, profesionalisme, motivasi dan pelayanan guna mewujudkan *good governance*.
4. Peningkatan kesejahteraan aparat untuk lebih meningkatkan motivasi dan orientasi kegiatan pada pelayanan prima.
5. Perbaikan sistem manajemen kepegawaian menuju terwujudnya *good governance*.

Sesuai dengan kebijakan umum dan program pembangunan daerah pada RPJMD 2013 – 2018 yaitu kebijakan terkait penciptaan birokrasi pemerintah yang profesional, bersih partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat, mendasari hal tersebut arah kebijakan yang ditempuh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas adalah :

1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur PNS di Kabupaten Banyumas.
2. Percepatan reformasi birokrasi, melalui pembenahan-pembenahan mekanisme kegiatan yang mendukung sistem perencanaan, sistem pelaksanaan, sistem pengawasan dan sistem evaluasi guna peningkatan efektifitas dan akuntabelilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas juga akan dipengaruhi oleh pelaksanaan pelayanan SKPD lain yang saling berkesinambungan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

B.1. Tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)
1	Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bermoral, kompetitif dan profesional menuju terciptanya prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	a. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia aparatur dibidang konseptual, teknis dan fungsional	Meningkatnya pemahaman petugas dalam menyelesaikan permasalahan kepegawaian	130 org	130 org	130 org	130 org	130 org
			Terlaksananya Pengembangan sumber daya aparatur melalui Diklat, tugas belajar, ijin belajar, ujian kedinasan kenaikan tingkat I dan II serta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah	1500 org	1500 org	1500 org	1500 org	1500 org
			Terfasilitasinya penyaringan Calon Praja IPDN tingkat kabupaten	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org
			Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai.	886 org/formasi	880 org/formasi	880 org/formasi	880 org/formasi	880 org/formasi

		b. Meningkatkan kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai;	Pembelakalan PNS yang akan memasuki purna tugas	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang
			Terbitnya petikan SK kenaikan pangkat dan SK peninjauan masa kerja golongan PNS	2570 orang	3060 orang	3050 orang	3040 orang	3030 orang
			Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu dan fasilitasi mutasi PNS	670 orang	750 orang	750 orang	750 orang	750 orang
			Terfasilitasi penilaian penetapan angka kredit jabatan fungsional (non guru dan Non bidang kesehatan)	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang
			Terwujudnya tertib administrasi PTT	75	47	22	18	16
		c. Meningkatkan Kualitas Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional;	Pengisian jabatan sesuai dengan formasi dan pengukuran kompetensi jabatan struktural	160 orang	170 orang	170 orang	180 orang	200 orang
			Penataan dan pengembangan karir secara proporsional	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
		d. terselesaikannya	Pembinaan PNS	30	15	15	15	15

		masalah kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan
			Penyelesaian SK ijin perkawinan dan perceraian	30 orang/SK	30 orang/SK	30 orang/SK	30 orang/SK	30 orang/SK
			Penyelesaian SK penjatuhan hukuman disiplin	17 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang
			Pelaksanaan Sidak	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan
			Fasilitasi pembuatan/kepemilikan Karpeg dan Karis-Karsu	1100 orang	850 orang	750 orang	750 orang	750 orang
		e. Adanya data kepegawaian yang akurat dan up to date;	Tersedianya data PNS dan CPNS yang akurat dan up to date melalui aplikasi SIMPEG (file/data pegawai)	15700 orang	15300 orang	15000 orang	15000 orang	16000 orang
			Penataan dan pemeliharaan arsip PNS dan CPNS.	15700 file	15300 file	15000 file	15000 file	16000 file
		f. Terlaksananya pengembangan aplikasi program SIMPEG	Penyempurnaan program Simpeg sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan data	0	0	1 program	0	0

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELUARAN SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk merealisasikan misi yang telah disepakati dilaksanakan melalui program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dan untuk mendukung program kegiatan yang di rencanakan dapat berjalan dengan baik harus diikuti dengan kemampuan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia aparatur yang profesional, sarana prasarana serta keuangan daerah yang memadai. Dari rencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013-2018

- Visi : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bermoral, kompetitif dan profesional.
Misi : Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah dan dengan cermat mengelola penggunaan sumber daya manusia
- Misi : 1 tersebut.
Mengakui performa dan prestasi pada semua tingkatan dan menciptakan lingkungan kerja profesional yang memeberikan jalan bagi pemenuhan diri serta pengembangan kariri aparatur pemerintah
- 2 daerah.
3 Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan (outcome, Output)	Data Capaian Tahun Awal				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi			
									Realisasi Th 2012		TH 2013		Th.2014		Th.2015		Th.2016		Th.2017				Th.2018		
									Kinerja	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Pemenuhan kebutuhan ketatausahaan baik fisik maupun non fisik kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya kebutuhan ketatausahaan kantor dengan lancar (bulan)	12	1.383.258.813	12	1.400	12	1.500	12	1.500	12	1.500	12	1.500	12	1.500	BKD	Kab. BMS
Terwujudnya aparatur pemerintah yang kompetitif, bermoral dan profesional menuju terciptanya prinsip-prinsip good governance	Terlaksananya 1 upaya peningkatan sumber daya manusia aparatur dibidang konstual, teknis dan fungsional	Meningkatkan 1 kualitas sumber daya aparatur						Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 Meningkatnya pemahaman petugas dalam menyelesaikan permasalahan kepegawaian (org)	115	25.010.700	210	75	130	80	130	90	130	95	130	95	130	95	BKD	Kab. BMS

								Program Pembinaan dan pengembangan aparat	1 Pengembangan sumber daya aparat melalui Diklat, tugas belajar/ijin belajar, ujian kedinasan kenaikan tingkat I dan tingkat II dan UKPPI (PNS/org)	1462	868.515.575	1500	900	1500	1.500	1500	1.600	1500	1.700	1500	1.800	1500	1.900	BKD	Kab. BMS
		2 Penyusunan formasi dan pengisian kekurangan formasi pegawai secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi						Program Pembinaan dan pengembangan aparat	1 Pengadaan Pegawai melalui : - Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai (org/formasi) - Fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN tingkat kabupaten (org)	1 93	45.490.500 8.200.000	7156 60	1045 70	886 70	1.000.000 70	880 70	1.000.000 70	880 70	1.000.000 70	880 70	1.000.000 70	880 70	1.000.000 70	BKD	Kab. BMS
	Meningkatnya 2 kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai	1 Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas 2 Terbitnya petikan SK kenaikan pangkat dan SK peninjauan masa kerja golongan PNS						Program Pembinaan dan pengembangan aparat	1 Terlaksananaya pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas (PNS/Org) 1 Terlaksananya pemrosesan kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja golongan PNS (org)	47 3085	di keTUan 153.441.450	400 3850	150 260	500 2500 70	180 240 60	500 3000 60	185 250 50	500 3000 50	190 260 40	500 3000 40	195 270 30	500 3000 30	200 280 30	BKD BKD	Kab. BMS Kab. BMS

		3 Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu serta fasilitasi mutasi PNS							1 Kelancaran pemrosesan pensiun dan penataan PNS (org)	871	85.556.000	765	100	520 150	125	550 200	150	550 200	175	550 200	200	550 200	225	BKD	Kab. BMS
		4 Terfasilitasinya penilaian penetapan angka kredit							1 Terlaksananya penyusunan dan penilaian penetapan angka kredit jabatan fungsional non guru dan non bidang kesehatan (kegiatan)	13	12.955.775	25	20	12	40	12	40	12	40	12	40	12	40	BKD	Kab. BMS
		5 Terwujudnya tertib administrasi PTT							1 Terlaksananya pengelolaan administrasi PTT (Org)	109	238.990.000	97	250	75	275	47	245	22	65	18	58	16	57	BKD	Kab. BMS
	3 Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian	1 Penyelesaian permasalahan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku						Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	1 Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian permasalahan PNS melalui : - Pembinaan PNS (kegiatan) - Penyelesaian SK ijin perkawinan dan perceraian (org) - Penyelesaian SK penjatuhan hukuman disiplin (org) - pelaksanaan SIDAK PNS (kegiatan)	37 16 1	58.598.700	50	120	30 30 17 6	180	15 30 15 6	205	15 30 15 6	205	15 30 15 6	225	15 30 15 6	225	BKD	Kab. BMS

									- Fasilitasi pembuatan Karpeg dan Karis Karsu (org)	2156	10.503.500	110	20	1100		850		750		750		750			
	4 Meningkatkan kualitas penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional	1 Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi						Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	1 Terlaksananya penataan dan pengembangan karir secara proporsional (Org)	8869	66.397.400	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	BKD	
									2 Terisinya jabatan sesuai dengan formasi dan pengukuran kompetensi jabatan struktural (org)	557	109.593.200	600	200	168	160	219	170	213	170	258	180	51	200	BKD	
	5 Tersedianya data yang akurat dan up to date	1 Tersedianya data PNS dan CPNS Kab. Banyumas							1 Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan up to date melalui aplikasi SIMPEG (data pegawai)	16111	15.350.225	1600	120	15.700	130	15300	130	15000	130	15000	130	16000	130	BKD	
		2 Tertata dan terpeliharanya arsip file kepegawaian							1 Terlaksananya pengelolaan arsip PNS dan CPNS (file/arsip)	16111	12.534.000	1600	15	15.700	15	15300	15	15000	15	15000	15	16000	15	BKD	

	6	Pengembangan SIMPEG	1	Tersedianya sistim aplikasi pelayanan kepegawaian								1	Penyempurnaan program Simpeg sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan data (program)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150	0	0	0	0	BKD	
--	---	------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	-----	--

Ket : Perkiraan pendanaan rupiah
dalam jutaan.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan (outcome, Output)	Data Capaian Tahun Awal				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi Th 2012		TH 2013		Th.2014		Th.2015		Th.2016		Th.2017		Th.2018			
						Kinerja	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Terwujudnya aparatur pemerintah yang kompetitif, bermoral dan profesional menuju terciptanya prinsip-prinsip good governance.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Pemenuhan kebutuhan ketatausahaan baik fisik maupun non fisik kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Ketatausahaan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 1 Terlayannya kebutuhan ketatausahaan kantor dengan lancar (bulan)	12	1.383.258.813	12	1.400	12	1.500	12	1.500	12	1.500	12	1.500	12	1.500	BKD	Kab. BMS
	1 Terlaksananya upaya peningkatan sumber daya manusia aparatur dibidang konseptual, teknis dan fungsional	1 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur		Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bintek Penyelesaian permasalahan kepegawaian	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang konseptual, teknis dan fungsional 1 Meningkatnya pemahaman petugas dalam menyelesaikan permasalahan kepegawaian (org)	115	25.010.700	210	75	130	80	130	90	130	95	130	95	130	95	BKD	Kab. BMS

				Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Meningkatnya kesadaran PNS akan Hak dan Kewajiban serta pengembangan sumber daya aparatur guna peningkatan pelayanan masyarakat																		
			1	Pengembangan sumber daya aparatur	1 Pengembangan sumber daya aparatur melalui Diklat, tugas belajar/ijin belajar, ujian kedinasan kenaikan tingkat I dan tingkat II dan UKPPI (PNS/org)	1462	868.515.575	1500	900	1500	1.500	1500	1.600	1500	1.700	1500	1.800	1500	1.900	BKD	Kab. BMS		
		2	Penyusunan formasi dan pengisian kekurangan formasi pegawai secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi	2	Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai	1 Pengadaan Pegawai melalui : - Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai (org/formasi) - Fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN tingkat kabupaten (org/pelamar)	1 93	45.490.500 8.200.000	7156 60	1045 	886 70	1.000 .000 	880 70	1.000 .000 	880 70	1.000 .000 	880 70	1.000.000 	880 70	1.000.000 	BKD	Kab. BMS	

	2	Meningkatnya kesejahteraan dan tertib administrasi pegawai	1	Pemberian bekal mental dan sepritual bagi PNS yang akan memasuki purna tugas	3	Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas	1	Terlaksananaya pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas (PNS/Org)	47	di keTuan	400	150	500	180	500	185	500	190	500	195	500	200	BKD	Kab. BMS
			2	Terbitnya petikan SK kenaikan pangkat dan SK peninjauan masa kerja golongan PNS	4	Pemprosesan kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja golongan PNS	1	Terlaksananya pemprosesan utk kenaikan pangkat	3085	153.441.450	3850	260	2500	240	3000	250	3000	260	3000	270	3000	280	BKD	Kab. BMS
							-	peninjauan masa kerja golongan				70			60		50		40		30			
			3	Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu serta fasilitasi mutasi PNS	5	Pemprosesan pensiun dan penataan PNS	1	Terlaksananya pemprosesan																
							-	Pensiun	871	85.556.000	765	100	520	125	550	150	550	175	550	200	550	225	BKD	Kab. BMS
							-	Penataan PNS					150		200		200		200		200			
			4	Terfasilitasinya penilaian penetapan angka kredit pejabat fungsional	6	Penyusunan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional non guru dan non bidang kesehatan	1	Terlaksananya penyusunan dan penilaian penetapan angka kredit jabatan fungsional non guru dan non bidang kesehatan (kegatan)	13	12.955.775	25	20	12	40	12	40	12	40	12	40	12	40	BKD	Kab. BMS

[illegible]

				11 Pemrosesan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional tertentu	2 Terisinya jabatan sesuai dengan formasi dan pengukuran kompetensi jabatan struktural (org)	557	109.593.200	600	200	168	160	219	170	213	170	258	180	51	200	BKD	Kab. BMS
	5 Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan up to date	1 Tersedianya data PNS dan CPNS Kab. Banyumas		12 Akurasi data PNS	1 Tersedianya data kepegawaian yang akurat dan up to date melalui aplikasi SIMPEG (data pegawai)	16111	15.350.225	1600	120	15.700	130	15300	130	15000	130	15000	130	16000	130	BKD	Kab. BMS
		2 Tertata dan terpeliharanya arsip file kepegawaian		13 Penelolaan Arsip PNS dan CPNS	1 Terlaksananya pengelolaan arsip PNS dan CPNS (file/arsip)	16111	12.534.000	1600	15	15.700	15	15300	15	15000	15	15000	15	16000	15	BKD	Kab. BMS
	6 Pengembanga n SIMPEG	1 Tersedianya sistim aplikasi pelayanan kepegawaian		14 Pengembanga n SIMPEG	1 Penyempurnaan program Simpeg sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan data (program)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150	0	0	0	0	BKD	Kab. BMS

Ket : Perkiraan pendanaan rupiah dalam jutaan.

BAB VI

**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DAERAH**

Sesuai dengan misi ke 1 (pertama) Bupati Banyumas yaitu *“Menciptakan birokarasi pemerintah yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahaan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat”*, hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2013-2018 dari misi tersebut mengarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dimana sebagai landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik good governance yaitu dengan prinsip-prinsip utama yang melandasi pelaksanaan pemerintahan yang akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, dengan sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada adapun indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM tersebut pada tabel berikut :

Tabel : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

NO	INDIKATOR	Kondisi Tahun Awal	Target Kinerja Tahunan					Kondisi akhir RPJM
			1	2	3	4	5	
1.	Jumlah pegawai Pemda yang mengikuti Diklat (orang/PNS)	622	520	520	520	520	520	520
2.	Jumlah pegawai Pemda yang lulus diklat (orang)	622	520	520	520	520	520	520
3.	Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM (orang)	1.019	96	80	93	98	98	119
4.	Prosentase PNS lulusan S1 (orang / Jumlah PNS Kabupaten).%	52	70	70	70	70	70	11

Dalam menyusun Renstra, BKD sebagai pengelolaan bidang kepegawaian / aparatur maupun pelaksana kebijakan manajemen kepegawaian di Kabupaten Banyumas, tentunya masih banyak yang harus disempurnakan disesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat dan untuk melayani kebutuhan yang selalu berkembang tersebut selalu mengevaluasi kinerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan guna untuk mensejahterakan masyarakat Banyumas.

Purwokerto, November 2013

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Drs. NUGROHO PURWOADI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630729 198810 1 001